



KANTOR CAMAT BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN



CASCADING KEC. BATUMANDI TAHUN 2022



Tahap 1 menentukan outcome

Cara menentukan outcome

- a Mandat/Tugas dan Fungsi
- b Permasalahan yang dihadapi
- c Ekspektasi atau harapan masyarakat dan stake holder

Masyarakat mengekspektasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Trik menentukan outcome

- 1 Outcome harus dirumuskan dengan kesepakatan bersama
- 2 Outcome instansi harus menggambarkan hasil yang strategis
- 3 Outcome tidak harus ketiga faktor pembentuk diatas , namun umumnya bisa saling terkait
- 4 Jika outcome strategis bukan final outcome atau intermediate outcome maka instansi harus melihat kembali kebenaran dari kinerja outcome tersebut



Tahap 1 Menentukan outcome Pemerintah Kecamatan	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi
---	--

Tahap 2

identifikasi CSF yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja

Trik menentukan CSF

- 1 CSF menggambarkan isu faktual
- 2 CSF menggambarkan kebutuhan mencapai kinerja dimasa mendatang
- 3 CSF mempertimbang perubahan lingkungan
- 4 Pastikan CSF adalah sebab atau cara dan outcome adalah akibat atau hasil

	CSF Pelayan Publik yang Berkualitas		Kondisi yang diperlukan
1	Pelayanan Publik Belum Optimal	renstra masalah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tahap 3

Uraikan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling teknis atau operasional

- 1 trik menguraikan kondisi antara sampai ke kondisi operasional (sebagai bahan menyusun pohon kinerja)
- 2 jangan kaitkan dulu dengan komponen perencanaan
- 3 jangan kaitkan dulu dengan sok eksisting
- 4 jangan kaitkan dulu dengan nama program atau kegiatan
- 5 jangan kaitkan dulu dengan anggaran
- 6 identifikasi adanya crosscutting dengan organisasi lain
- 7 jangan redundansi atau kondisi dituangkan berulang kali
- 8 cek lagi siapa tahu alpa menentukan kondisi anantara yang urgen
- 9 eliminasi variabel yg tidak memiliki pengaruh besar

CSF yang sudah dirubah ke bahasa kondisi pada tahap 2	Kondisi yang diperlukan (kondisi antara sampai kondisi paling operasional)	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kondisi antara utama
	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kondisi antara
	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kondisi operasional
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kondisi antara
	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kondisi operasional
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kondisi antara
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kondisi operasional
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	kondisi antara utama
	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	kondisi antara
	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kondisi operasional
	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kondisi antara
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	kondisi operasional
	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	kondisi antara utama
	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kondisi antara
	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	kondisi operasional
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	kondisi antara utama
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kondisi antara
	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	kondisi operasional
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kondisi antara utama
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kondisi antara
	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kondisi operasional
	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kondisi operasional
	Terfasilitasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	kondisi operasional
	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	kondisi operasional

Tahap 4 merumuskan indikator kinerja

Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja	Keterangan
Tahap 1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kinerja strategis skpd
Tahap 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kinerja strategis
Tahap 3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah waktu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kinerja operasional
Tahap 3	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	kinerja operasional
Tahap 3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kinerja operasional
Tahap 3	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kinerja taktikal immediate

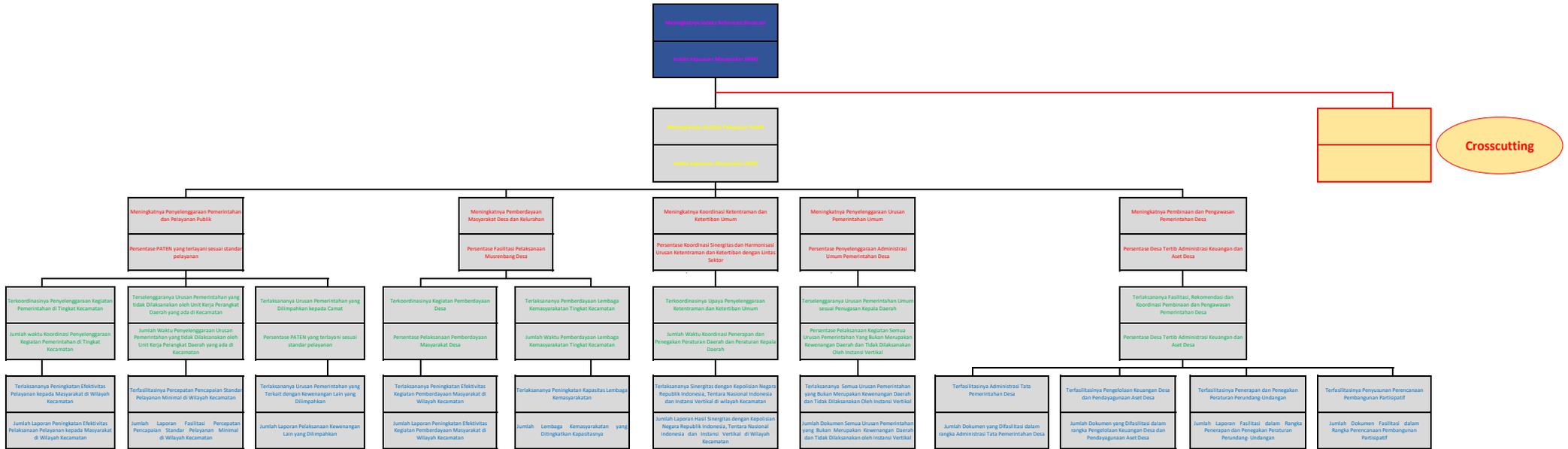
Tahap 3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kinerja operasional
Tahap 3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Waktu Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kinerja operasional
Tahap 3	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kinerja operasional
Tahap 3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	kinerja taktikal intermediate
Tahap 3	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	Kinerja taktikal immediate
Tahap 3	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kinerja operasional
Tahap 3	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	kinerja operasional
Tahap 3	Terfasilitasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	kinerja operasional
Tahap 3	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	kinerja operasional

Tahap 5 menerjemahkan pohon kinerja ke komponen perencanaan dan kinerja jabatan

Rujukan Tahapan	Kinerja	Indikator Kinerja		Keterangan
Tahap 1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kinerja strategis skpd	tujuan skpd
Tahap 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kinerja strategis	sasaran pertama skpd pk camat
Tahap 3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	kinerja intermediate	taktikal sasaran program pk kasi
Tahap 3	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah waktu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kinerja immediate	taktikal sasaran kegiatan pk kasi/jafung/analisis
Tahap 3	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan pk staf umum
Tahap 3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada	kinerja operasional	sasaran kegiatan pk kasi/jafung/analisis
tahap 2	Terfasilitasinya Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	kinerja strategis skpd	sasaran sub kegiatan pk staf umum
Tahap 3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	kinerja intermediate	taktikal sasaran kegiatan pk kasi/jafung/analisis
Tahap 3	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kinerja immediate	taktikal sasaran sub kegiatan pk staf umum
Tahap 3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa	kinerja operasional	sasaran program pk kasi
Tahap 3	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	kinerja operasional	sasaran kegiatan pk kasi/jafung/analisis
Tahap 3	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kinerja immediate	taktikal sasaran sub kegiatan pk staf umum
Tahap 3	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kinerja operasional	sasaran kegiatan pk kasi/jafung/analisis
Tahap 3	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan pk staf umum
Tahap 3	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	kinerja intermediate	taktikal sasaran program pk kasi
Tahap 3	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Waktu Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kinerja immediate	taktikal sasaran kegiatan pk kasi/jafung/analisis
Tahap 3	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan pk staf umum
Tahap 3	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	kinerja operasional	sasaran program pk kasi
Tahap 3	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	kinerja intermediate	taktikal sasaran kegiatan pk kasi/jafung/analisis
Tahap 3	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kinerja immediate	taktikal sasaran sub kegiatan pk staf umum

Tahap 3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	kinerja operasional	sasaran program	pk kasi
Tahap 3	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	kinerja operasional	sasaran kegiatan	pk kasi/jafung/analisis
Tahap 3	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	kinerja taktikal intermediate	sasaran sub kegiatan	pk staf umum
Tahap 3	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kinerja taktikal immediate	sasaran sub kegiatan	pk staf umum
Tahap 3	Terfasilitasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	pk staf umum
Tahap 3	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	pk staf umum
Tahap 2				CROSSCUTTING	

POHON KINERJA



Crosscutting

